

PAPUA AKTUAL 2004

(Januari - Maret)

Sekilas informasi

OLEH

SEKRETARIAT Keadilan & Perdamaian

KEUSKUPAN JAYAPURA

KATA PENGANTAR

Dalam laporan berkala ini kami sajikan suatu rangkuman pengamatan peristiwa-peristiwa selama tiga bulan pertama tahun 2004, Januari sampai dengan Maret. Berdasarkan rangkuman ini kami menyusun suatu uraian yang lebih mendalam untuk menunjukkan pada sejumlah arah perkembangan yang tersirat dalam peristiwa-peristiwa tadi. Kami berpendapat, sangat pentinglah untuk melihat dan memahami pola perkembangan ini karena akan berdampak besar pada apa yang diharapkan masyarakat di Papua dalam kehidupannya di masa mendatang.

Kami menyajikan suatu rangkuman pengamatan peristiwa terlebih dahulu (Bagian I), kemudian disusuli dengan uraian atas rangkuman peristiwa-peristiwa tersebut (Bagian II).

Selamat membaca!

Jayapura, 30 Mei 2004

Drs. Theo van den Broek ofm
Direktur SKP Jayapura

BAGIAN I

RANGKUMAN PENGAMATAN PERISTIWA BULAN JANUARI – MARET 2004

A. MENDAHULUI TAHUN 2004

Sebelum mencatat sejumlah peristiwa selama tiga bulan pertama tahun 2004, kami mengingat kembali beberapa hal penting yang terjadi selama bulan terakhir tahun 2003, a.l.

[1] Pengangkatan Timbul Silaen, sebagai Kapolda Papua (**tgl. 1 Dec. 2003**). Yang perlu dicatat bahwa tidak ada protes dari Gubernur, walaupun menurut ketentuan dalam UU 21/2001 Gubernur perlu dilibatkan dalam konsultasi mengenai pengangkatan seorang Kapolda;

[2] Penangkapan 4 mahasiswa Papua di Semarang yang terlibat dalam demo damai pada tanggal **1 Desember 2003**, mengibarkan bendera Papua di udara dengan menggunakan balon gas. Mereka terancam dihukum penjara selama 20 tahun dan sempat ditahan selama 3 bulan di Mapolresta Semarang, namun dibebaskan pada tanggal **1 Februari 2004**.

[3] Adanya demo di Semarang pada **tgl 3 Desember 2003** oleh sekelompok Jemaah Islamiah dari Solo (berjumlah 75 orang) yang menuntut supaya mahasiswa-mahasiswi Papua dihukum secara tegas.

[4] Mozes Weror (tinggal dan hidup di PNG) mengajak Pemimpin-Pemimpin serta bangsa Papua untuk 'bikin kacau': "itu bekas-bekas Tim-Tim (*yang dimaksud: pembentukan milisia Eurico Gutierrez dan pengangkatan Timbul Silaen sebagai Kapolda*) masuk tanah Papua itu sangat dibutuhkan untuk suhu politik tanah Papua harus HANGAT dan perlu TERBAKAR. Ini ada keuntungannya untuk membantu perjuangan diplomasi di luar negeri". (**internet/email: 15 Desember 2003**);

[5] Para tahanan ('anggota pentolan PDP') di Wamena yang pernah diadili sehubungan dengan peristiwa berdarah di Wamena 2000, pada tgl. **11 Desember 2003** tiba-tiba diperintahkan oleh Kejaksaan Negeri Wamena untuk masuk kembali ke penjara berdasarkan 'penolakan kasasi mereka oleh Mahkamah Agung'; merupakan eksekusi putusan MA oleh pihak Kejaksaan Negeri di Wamena. Yang lebih mengejutkan lagi: pada tanggal **21 Des. 2003** mereka tiba-tiba 'diculik' dari penjara untuk diterbangkan ke Jakarta. Di Sentani Airport terjadi protes oleh LSM Kemanusiaan dan protes ini dibantu dengan rusaknya pesawat Merpati, maka mereka tidak dapat diberangkatkan ke Jakarta tetapi dibawa ke Polda Papua.

[6] Pembentukan KPU "Provinsi Irian Jaya Barat" dengan resmi ditolak oleh KPU Pusat pada tanggal **16 Desember 2003**. Namun seminggu kemudian KPU Pusat mengangkat seorang "Sekretaris" yang de facto menjalankan tugas seperti KPU.

[7] Pertemuan akbar “Dengar Pendapat Umum” diselenggarakan oleh Ketua DPRD Papua sehubungan dengan persoalan Otsus dan Inpres No. 1/2003 tentang pemekaran provinsi; pertemuan diadakan pada tanggal **15-16 Desember 2003**.

B. JANUARI-MARET 2004

[1] Pada tanggal 19 Desember 2003 para terdakwa dalam kasus pembobolan gudang senjata di Wamena (4 April 2003) dituntut hukuman penjara seberat minimal 15 tahun sampai tahanan seumur hidup. **Pertengahan Januari 2004** vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Wamena kepada para terdakwa ternyata memperkuat tuntutan para jaksa tersebut diatas. Tgl. **12 Febr. 2004** salah seorang tahanan (Des Wenda) berhasil “kabur” dari Lembaga Pemasyarakatan Wamena.

[2] Persoalan penundaan sidang kasus Abepura di Makassar –*pengadilan kasus Hak Asasi Manusia yang perdana di Indonesia*:- penundaan terjadi karena pimpinan Polri tidak bersedia untuk menyerahkan kedua terdakwa yang masih ‘dalam dinas aktif’. Pada **minggu terakhir Januari 2004** protes diluncurkan oleh sejumlah LSM kepada Polri. Selanjutnya dalam *Kompas* hari Senin (**2 Febr. 2004**), diberitakan jika Kepala Polri menyetujui untuk menyerahkan kedua terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan HAM di Makassar. Menurut berita terakhir sidang di Makassar akan dimulai pada tanggal 7 Mei 2004.

[3] Komnas HAM mulai bergerak menangani kasus Wasior dan Wamena dengan berkunjung ke Jayapura; memulai penelitian pada **26 Januari 2004** di Wamena/Wasior dan tahap kedua direncanakan untuk bulan Maret.

[4] Komisi I DPR RI mengusulkan supaya segera dilakukan operasi militer sekaligus memberlakukan status darurat militer di Papua (*Cepos* **23 Jan 2004**; dalam judul dikatakan ‘darurat sipil’ bukan ‘darurat militer’); kesimpulan berdasarkan diskusi dalam Komisi setelah mendapat input dari anggota komisi yang akhir-akhir ini mengunjungi Papua. Ungkapan penolakan terhadap gagasan ini oleh pelbagai instansi di Papua dapat dibaca dalam *Cepos* **24-29 Jan. 2004**.

[5] Berita dalam *Radar Timika* (**27 Jan. 2004**) bahwa ada suatu tim Polisi dari pusat di Timika, sehubungan dugaan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Jemaah Islamiah di daerah itu.

[6] *Issue* bahwa Pemilu akan diganggu oleh ‘intel asing’ dihidupkan oleh Kol. Inf Agus Muljadi, Danrem Jayapura (*Cepos* **30 Jan 2004**), maka perlu diwaspadai! Info samar-samar ini disampaikan tanpa menunjuk nama atau indikasi yang jelas. Pada **tanggal 6 Februari 2004** kantor PBHI dan Kontras di Jakarta didemo oleh kelompok “Lembaga Pemberdaya Masyarakat Pesisir Tangerang”, yang menuduh kedua lembaga tadi sebagai perpanjangan tangan pihak asing yang berniat menghancurkan Indonesia.

[7] Pada tanggal **5 Februari 2004** para pemimpin agama di Papua memperbaharui komitmennya untuk membangun Papua Tanah Damai dalam acara publik perayaan hari masuknya Injil di Papua. Turut dalam dalam komitmen ini, Gubernur Papua, Kapolda dan Pangdam Trikora (lihat *Cepos* tgl. **6 Febr. 2004**).

[8] Tanggal **6 Februari 2004** terjadi gempa bumi di Nabire dengan scale Richter 6,8. Terdapat juga sejumlah gempa susulan. Tewas sekitar 37 orang dan 125 luka-luka, sedangkan banyak bangunan rusak berat.

[9] Akbar Tandjung dinyatakan 'bebas murni' oleh Mahkamah Agung (MA) pada tanggal **12 Feb. 2004**.

[10] Selama rapat kerja bupati/walikota se-Papua dengan Pangdam Trikora yang diadakan pada tgl. **16 Febr. 2004**, Mayjen TNI Nurdin Zainal, mengakui adanya penambahan pasukan (tambahan dua batalyon).

[11] Tanggal **17 Febr. 2004** diselenggarakan seminar sehari oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta dengan tema, 'membangun kapasitas untuk implementasi Otonomi Khusus Papua'; langkah ini merupakan follow-up dari laporan yang diterbitkan Council on Foreign Relations (Washington) pertengahan tahun lalu yang berjudul "Indonesia Commission: Peace and Progress in Papua". Laporan singkat dapat dibaca dalam edisi Jakarta Post tgl. 18 Februari 2004.

[12] Tanggal **17 Febr. 2004** berlangsung sidang di Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan *judicial review UU No. 45/1999*. Selama sidang ini Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno dimintai keterangan; ia menyatakan, UU Pemekaran Papua tidak bertentangan dengan UUD 1945.

[13] Pada tanggal **18 Febr. 2004** Philip Karma memimpin aksi demo Koalisi Masyarakat Sipil Internasional HAM Papua di depan gedung DPRD Propinsi Papua. Demo diikuti sekitar 100 orang. Tujuan utama demo ini untuk mendesak terselenggaranya dialog internasional di Papua terkait dengan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi.

[14] Dari tanggal **22-26 Febr. 2004** diadakan Sidang Dewan Adat Papua II bertempat di Biak. Tema sidang: "Masyarakat Adat Papua menjadi tuan di negerinya pasti berdaulat dan bermartabat": sedangkan sub-temanya: "Mewujudkan masyarakat adat Papua sebagai subyek demokrasi dan pembangunan menuju Papua Baru yang mandiri, damai dan sejahtera". Sidang dihadiri oleh sekitar 350 orang yang berasal dari seluruh Tanah Papua.

[15] Tanggal **25 Febr. 2004** Uskup Agung Desmond Tutu (Afrika Selatan) mengeluarkan press release dimana beliau mengungkapkan kesedihannya sewaktu mendengar mengenai sejarah bangsa West Papua; beliau meminta SekJen PBB untuk merevisi proses

pengambilan keputusan dalam tubuh PBB pada tahun 1969 mengenai hasil “Act of Free Choice” di Papua.

[16] Tanggal **4 Maret 2004** Presiden Megawati berkunjung (kilat) ke Nabire (untuk korban gempa) dan Jayapura (meresmikan gedung kantor PDI-P); kunjungannya dinilai tidak berbobot oleh banyak pihak: [1] untuk korban Nabire terlambat, [2] untuk kantor PDI-P menunjukkan kesempatan niat politiknya dan gaya mengutamakan politik partainya, dan [3] tidak menjawab sama sekali masalah-masalah yang sebenarnya ada di Papua. Para mahasiswa mengungkapkan protesnya dalam orasi-orasi dan pamflet di kampus Uncen Abepura.

[17] Selama beberapa hari berturut-turut (tgl. **5-6 Maret 2004**) *Cepos* sibuk melaporkan berita aparat keamanan mengenai bahaya ‘intelijen asing’ yang sedang berada di Indonesia/Papua untuk mengacaukan pemilu. Yang tidak kalah berbahaya adalah perluasan “intel asing” dengan kalangan LSM yang menurut aparat keamanan dimanfaatkan oleh ‘intel asing’ dimaksud, dan lebih buruk lagi diperluas dengan catatan bahwa intel asing ini memakai ‘tenaga lokal’. Direktur ICS Papua (*Institute for Civil Strengthening*), Budi Setyanto menanggapi dengan kritis pemberitaan dari pihak aparat keamanan. “...Jangan hanya main wacana publik, tetapi langsung menindak lanjuti sesuai dengan kewenangan kalau memang sudah terdeteksi dan menyalahi aturan hukum yang berlaku. Masyarakat sudah mempunyai asumsi kalau situasi di Papua sebenarnya aman-aman saja. Saya khawatir jika isu intelijen ini dijadikan konsumsi publik, akan mempunyai implikasi politik terlebih menjelang pemilu”, paparnya.

[18] Gubernur Provinsi Papua mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat sehubungan dengan ‘*illegal logging*’. Ternyata pencurian besar-besaran terjadi di Papua dan menurut Gubernur (**5 Maret 2004**) maraknya *illegal logging* merupakan dampak dari kebijakan Departemen Kehutanan bersama Departemen Perdagangan yang melarang ekspor kayu log. Bukan saja kayu yang dicuri; pencurian ikan secara besar-besaran juga terjadi di laut. Pada tanggal **14 Maret 2004** Komandan Gugus Keamanan Laut menyatakan bahwa selama 2 bulan pertama tahun 2004 ada peningkatan kasus “*illegal fishing*”. Ternyata ditemukan 25 kasus, sedangkan kasus “*illegal logging*” mencapai 24 kasus.

[19] Walau kampanye pemilu belum dimulai, masyarakat, termasuk para kepala suku, sudah mulai diarahkan untuk terlibat dalam Pemilu nanti. Seluruh kepala suku di Jayawijaya dalam pertemuan bersama di aula Mapolres Jayawijaya menyatakan tekad bulat untuk siap ikut dan menyukseskan Pemilu 2004. Pernyataan diungkapkan di hadapan Kapolres Jayawijaya pada tanggal **6 Maret 2004**.

[20] Pada tanggal **8 Maret 2004** isu ‘intel asing’ masih dilengkapi lagi dengan isu: “GPK akan mengacaukan pemilu”. Panglima mengajak masyarakat untuk waspada. Panglima mengaitkan ancaman GPK ini dengan adanya pasukan cadangan di Manokwari yang standby; dua batalyon yang akan didatangkan seminggu sebelum pemilu. Ketua KPU

Provinsi Papua, Ferry Kareth, menanggapinya dengan menyatakan bahwa isu semacam itu biasa-biasa saja. “Waktu pemilu tahun 1999 juga demikian, jadi KPU Provinsi Papua belum bisa mengambil langkah-langkah tegas untuk mengantisipasi hal tersebut, sebab KPU sendiri telah turun hingga ke pelosok-pelosok terpencil dan tidak ada bukti-bukti konkrit”, katanya.

[21] Diadakan apel besar-besaran polisi-tentara sebagai persiapan PAM Pemilu; pada tanggal **9 Maret 2004** apel ini dipimpin langsung oleh Kapolri (Jen Drs. Da'i Bachtiar, SH) dan dihadiri Pangdam TNI Jen. Endriartono Sutarto di Gunung Merah, Sentani. Dalam pelbagai pertemuan para petinggi ini, keadaan di Papua dibicarakan dan isu ‘ancaman gangguan pemilu’ ditiupkan terus, namun disimpulkan bahwa “tidak perlu DOM” ; Pada catatan pinggir Om Cepos menanggapi arah pemikiran ini dengan komentar singkat: “Papua hanya butuh MRP – Majelis Rakyat Papua”.

[22] Pemerintah Vanuatu, selama berkunjung ke Jakarta tanggal **9 Maret 2004**, menyangkal keras bila negaranya mengakui eksistensi dua gerakan separatis di Indonesia, Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

[23] Rencana pembentukan Komda HAM di Papua segera direalisasikan dengan dibentuknya Tim Seleksi calon anggota Komnas HAM Perwakilan Papua oleh Komnas HAM pada 10 Maret 2004, beranggotakan lima orang, masing-masing: Selfiana Sanggenafa SH (Ketua), Abdul Rahman Upara SH (Sekretaris), Johanis Abraham Ramandey SH, Frederika Korain SH, dan Drs. Frans Frist Apomfires, M.Si (Anggota). Tim ini sedang mempersiapkan proses perekrutan dan seleski anggota sebanyak 7 orang.

[24] Pada saat kampanye Pemilu 2004 yang dimulai **11 Maret 2004** (jam 00.00) di Papua juga mulai diberlakukan “status siaga 1”. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari “Operasi Mantap Brata XII-2004” dengan sasaran operasi pengamanan Pemilu 2004. Untuk Pemilu, Polda akan kerahkan 6.000 personil. Papua, seperti wilayah lain di RI diramalkan karena kampanye partai politik menjelang Pemilu yang akan diadakan pada tanggal 4 April 2004.

[25] Menurut berita *Cepos* pada tanggal **12 Maret 2004** telah terdapat kontak senjata antara TNI dan sekelompok OPM di sekitar Sarmi; seorang pemimpin OPM, Leo Wresman, ditembak mati. Pihak TNI menggarisbawahi bahwa dengan demikian cukup jelas ada ancaman bahwa GPK memang akan berupaya menggagalkan Pemilu di Papua. Seorang ibu bernama Fransina Sawen yang diduga sebagai keluarga GPK diamankan oleh anggota TNI Koramil Sarmi, untuk diminta keterangan. Dengan demikian dimulai operasi penyisiran dan pengejaran empat anggota GPK yang dinyatakan meloloskan diri saat terjadi kontak senjata.

[26] Pada tanggal **13 Maret 2004** Elsham Papua bersama Sinode GKI menyelenggarakan suatu seminar sehari dengan pokok pembahasan apakah terdapat “suatu proses Genosida di Papua”; seminar ini menanggapi laporan studi dari sekelompok mahasiswa di Yale Law School yang diterbitkan pada bulan Nov. 2003.

[27] PT Wapoga Mutiara Timber cabang Jayapura memberikan dana kompensasi terhadap hasil-hasil hutan yang telah diperoleh selama ini. Pada tanggal **15 Maret 2004** Rp. 1,2 milyar diberikan kepada masyarakat di Distrik Unurungguai dan Distrik Bonggo berdasarkan suatu keputusan Gubernur No. 50/2003.

[28] Tanggal **17 Maret 2004** Mgr. Leo L. Ladjar ofm, Uskup Jayapura, memberikan kesaksian atas nama Pemimpin Agama di Papua didepan Mahkamah Konstitusi di Jakarta terkait dengan akibat-akibat negatif pemaksaan pemekaran di Papua. Pada kesempatan yang sama anggota eksekutif Dewan Adat, Sefnat Ohee, menyatakan bahwa masyarakat Papua menolak dengan keras adanya UU No. 45/1999, dan menerima sepenuhnya UU No. 21/2001 tentang Otsus di Papua (*Papua Post* tgl. 19 maret 2004).

[29] Karena DPR-D Papua sedang menjalankan prosedur hukum untuk meniadakan dampak Inpres No.1/2003, maka cukup mengherankan bahwa seorang anggota Komisi F DPRD Papua, Anton Kelanangame, berkampanye di Nabire (PDI-P) pada tanggal **17 Maret 2004** dengan mencari pendukung melalui gagasan menjadikan Nabire ibu kota provinsi baru Irian Jaya Tengah. (*Papua Post* 19 Maret 2004).

[30] Dalam *Cepos* tanggal **17 Maret 2004** Pangdam XVII/Trikora sekali lagi mengutarakan niatnya untuk menumpas-habiskan unsur OPM/TPN. Salah satu langkah dalam upaya itu adalah identifikasi semua TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang 'rawan'. TPS-TPS itu, menurutnya untuk sebagian besar berlokasi di wilayah perbatasan dan berhubungan ke wilayah Pegunungan Tengah. Semua TPS yang rawan ini akan dilengkapi dengan kehadiran TNI.

[31] Ternyata Polda mulai bergabung dengan TNI dalam mengamankan Pemilu dengan menempatkan pasukannya (Brimob) di pelbagai tempat (*Cepos* tanggal **18-19 Maret**) dengan asumsi, Pemilu akan diganggu oleh pihak OPM/TPN. Tempat pertama adalah Sarmi, lalu ke Merauke, Wamena dan tempat lain.

[32] Susilo Bambang Yudhyono, menteri koordinasi keamanan, mengundurkan diri dari Kabinet karena menilai bahwa ruang geraknya mulai dibatasi oleh Presiden dkk. Posisinya diisi oleh Hari Sabarno, menteri dalam negeri.

[33] Dewan Adat Papua (DAP) melalui Sekretaris Pemerintahan Adat Papua, Sayid Alhamid, menyerukan agar seluruh masyarakat yang ada di Papua menggunakan hak pilihnya. Seruan ini merupakan amanat dari Sidang II Dewan Adat Papua yang berlangsung di Biak, 22-24 Februari 2004 yang lalu.

Ketua Dewan Adat, Tom Beanal, menandatangani suatu kesepakatan dengan partai politik tertentu, yakni Partai Merdeka dengan keterangan: "memilih Partai Merdeka tidak lain selain untuk menggolkan wakil dari Dewan Adat itu saja" (*Cepos* tanggal **19 Maret 2004**). Kontrak dengan Partai Merdeka hanya bermaksud untuk menjamin bahwa kalau seseorang sudah dipilih sebagai wakil dalam dewan, ia tidak berkelakuan selain sebagaimana dijanjikan dalam

kampanye; sebagai suatu sarana kontrol, dan yang bersangkutan langsung ditegur jika nantinya 'lupa kepentingan masyarakat'.

[34] Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Jayapura merasa prihatin dengan keberadaan anak jalanan di kota ini yang jumlahnya terus bertambah. (**19 Maret 2004**).

[35] Unicef Papua diwakili Senior Operation Officer Unicef, Philip N Wilson memberitahukan kepada Gubernur JP Solossa pada tanggal **27 Maret 2004** (*Papua Pos*) bahwa kematian Ibu dan anak di Papua tertinggi di Indonesia, karena Papua dihadapkan dengan tantangan medan yang berat dan masalah budaya masyarakat.

[36] Menteri Perhubungan mengumumkan kenaikan tarif telepon sebesar 9-28 % mulai 1 April 2004.

[37] Pada tanggal **30 Maret 2004** diperoleh berita dari Pengadilan Tinggi (PT) Papua bahwa Memori Banding dari para terpidana kasus pembobolan gudang senjata Kodim Jayawijaya 4 April 2003 ditolak dan PT memperkuat pidana yang diputuskan oleh PN Wamena. Maka, ke-8 tahanan tetap dipidana dengan masa penjara yang sangat berat, minimal 20 tahun hingga hukuman penjara seumur hidup. Tim Penasehat Hukum Koalisi LSM menyatakan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta.

BAGIAN II

POLA PERKEMBANGAN BULAN JANUARI – MARET 2004

Dalam uraian pola perkembangan kami akan memberikan perhatian pada sejumlah unsur kunci, sbb: [1] aspek *suasana keamanan*, [2] *pemekaran dan Otsus*, [3] *peranan masyarakat sipil*, [4] unsur *penegakan hukum*, [5] *sosial-ekonomi* dan *kependudukan*, dan akhirnya [6] unsur *suasana umum/nasional*.

SUASANA KEAMANAN

Dalam refleksi akhir tahun¹ telah kami catat bahwa tahun 2003 memperlihatkan suatu peningkatan pemakaian kekerasan dalam upaya menyelesaikan persoalan di Papua. Kenyataan demikian secara khusus dialami oleh masyarakat sekitar Wamena setelah kejadian pembobolan gudang senjata Kodim di Wamena pada tanggal 5 April 2003. Kejadian itu disusuli suatu operasi militer besar-besaran di Pegunungan Tengah. Rasa aman juga kurang dibantu dengan pembentukan suatu milisi (Front Pembela Merah Putih) pimpinan Eurico Gutierrez, yang diprakarsai di sekitar Timika.

Selama tahun 2004 aparat keamanan makin vokal menyuarakan kewaspadaannya terhadap situasi di Papua. Walau tidak dapat menunjuk kejadian-kejadian yang betul mengganggu rasa aman di Papua, namun sejumlah isu terus dikumandangkan; adanya intel asing yang ingin mengacaukan Pemilu nanti, dan adanya ancaman yang sama dari pihak GPK. Isi isu-isu demikian menjadi alasan untuk [1] merencanakan kedatangan pasukan tambahan, tiga batalyon, sambil memantapkan posisi TNI di seluruh Papua, termasuk pembangunan suatu kompleks militer yang baru di sekitar Wamena dan Merauke; [2] mengadakan operasi militer yang bersasaran menangkap / menghabisir unsur OPM, dimulai di Sarmi tgl. 12 Maret dengan menembak mati seorang pemimpin OPM, dan [3] memberlakukan status Siaga I oleh Polda sewaktu kampanye Pemilu dimulai. Semua TPS yang dinilai 'rawan' (artinya terancam oleh GPK/OPM) akan diidentifikasi dan dilengkapi dengan aparat TNI. Polda tidak kalah turut mengikuti pola yang sama dan akan mengirim tambahan Brimob ke pelbagai tempat a.l. Sarmi, Merauke dan Wamena.

Pemahaman yang jernih mengenai keadaan aman dan kondusif juga dikaburkan oleh suatu gerakan di tingkat pusat pemerintahan, dimana Komisi I DPR RI pada bulan Januari 2004 menyarankan kepada Kabinet untuk memberlakukan 'darurat sipil' di Papua. Entah apa alasannya, tidak jelas, namun gagasan ini membuat semua pihak di Papua mengajukan protes. Rasa aman di Papua juga tidak dibantu dengan ajakan oleh Mozes Weror (dari markasnya di PNG) kepada masyarakat di Papua untuk membuat kekacauan di Papua. Semuanya ini tidak membantu untuk menciptakan suatu suasana yang tenang dan suatu keadaan yang bebas 'bahasa perang'.

¹ Refleksi itu dapat dibaca di www.hampapua.org

PEMEKARAN dan OTSUS

Pasti kita semua sadar bahwa tahun 2003 didominasi oleh pembentukan provinsi-provinsi baru setelah terbitnya Inpres No. 1/2003 yang memerintahkan percepatan pemekaran provinsi di Papua. Walau isi Inpres no. 1/2003 dinilai tidak sah karena bertentangan dengan UU 21/2001 mengenai Otonomi Khusus, pemerintah pusat yang didukung BIN tidak peduli dengan adanya protes dari segala pihak di Papua. Pemekaran tetap diterapkan dan bangsa Papua dipecah-belah bahkan hingga terjadi kekerasan yang hebat di Timika. Sekaligus dilakukannya pemekaran melumpuhkan segala pelaksanaan Otsus selama tahun 2003.

Proses pemekaran ternyata berjalan terus tanpa adanya tanda dilakukan suatu revisi atau upaya untuk menahan diri. Setelah pj. Gubernur Irija Barat yang baru diangkat secara resmi (Nov. 2003), provinsi yang baru terus dikunjungi oleh petinggi-petinggi dari Jakarta – termasuk mantan Wakil Presiden RI Try Sutrisno pada tgl. 5 Maret 2004 - seakan-akan mau menggarisbawahi sahnya status provinsi Irija Barat. Nampak para penguasa di Jakarta tidak mempedulikan Mahkamah Konstitusi di Jakarta yang sedang memproses suatu *judicial review* mengenai sah-tidaknya Inpres No. 1/2003 atas permintaan DPRD Papua (17 Februari 2004), dan juga pernyataan dari acara dengar pendapat (16 Dec. 2003) yang diselenggarakan oleh DPRD dimana pemekaran ditolak sedangkan pelaksanaan Otsus secara konsisten dituntut dan mendapat penekanan. Kekacauan sekitar pemekaran masih diperbesar dengan pengangkatan diam-diam seorang “sekretaris KPU setempat” (23 Dec. 2003) walau pendirian suatu KPU di propinsi tersebut secara resmi telah ditolak (16 Dec. 2003) oleh instansi yang sama.

Di tingkat Jakarta, CSIS (Center for Strategic and International Studies) telah berusaha (17 Feb. 2004) untuk mengangkat persoalan di Papua melalui suatu seminar sehari; dengan usaha demikian CSIS ingin mencapai serta menyebarkan suatu pemahaman yang lebih jernih mengenai permasalahan di Papua dan juga turut mendesak Pemerintah Pusat untuk menjadi lebih serius dan konsisten dalam melaksanakan Otsus, termasuk pengesahan terbentuknya MRP (Majelis Rakyat Papua). Rupanya upaya-upaya ini (proses *judicial review*, seminar oleh CSIS, dll) tidak ada artinya di mata pemerintah pusat; pada awal Maret para pegawai eselon I dan II di provinsi Irian Jaya Barat diangkat secara resmi.

Tentu saja isu Pemekaran / Otsus termasuk dalam ‘tema-tema kampanye Pemilu’ dan memberi sinyal yang cukup memprihatinkan bahwa seorang anggota DPRD Papua yang sedang berkampanye menunjukkan sikap yang kurang konsisten karena lebih dimotivasi oleh kepentingan partai atau pribadinya saja (bdk. berita tgl 17 Maret dari Nabire).

PERAN MASYARAKAT SIPIL

Salah satu tolok ukur kemajuan dalam proses demokrasi adalah berperannya masyarakat sipil dalam penentuan kebijakan pemerintah. Hingga mundurnya Presiden Suharto tidak ada upaya untuk mengembangkan peran masyarakat sipil karena segalanya diatur secara pusat di Jakarta dan para pegawai negeri tinggal melaksanakannya saja; segala daya kreativitas dimatikan termasuk proses melahirkan pemimpin-pemimpin masyarakat. Dikala hangatnya

gerakan reformasi memudar, ternyata masyarakat kurang memiliki pemimpin-pemimpin yang dapat memanfaatkan peluang-peluang untuk sendiri mengambil peran yang besar, sehingga dengan perlahan-lahan masyarakat kembali pada sikap “menunggu petunjuk Bapak atau Ibu Presiden”, alias menunggu keputusan pemerintah pusat. Sekaligus peluang yang tersirat dalam pelaksanaan Otonomi Khusus turut tenggalam karena kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan dari pemerintah pusat, karena kehilangan daya kreativitas dari pemimpin-pemimpin pemerintah daerah, karena kekaburan agenda politik kelompok masyarakat yang diwakili oleh PDP, dan karena kebingungan yang melanda dan melumpuhkan masyarakat di Papua pada umumnya.

Namun demikian di tengah segala ketidakpastian masih terlihat pelbagai kegiatan pihak sipil. Pada akhir tahun lalu di beberapa tempat diadakan demonstrasi, a.l. di Semarang dan Bandung (1 Dec. 2003); akibatnya, beberapa mahasiswa ditahan di Semarang dan sekelompok yang berafiliasi dengan Jemaah Islamiah memanfaatkan penahanan mahasiswa di Semarang untuk mengungkapkan pendapatnya “anti perjuangan di Papua” sambil membakar bendera Bintang Kejora. Pada akhirnya para mahasiswa dibebaskan karena kurangnya bahan bukti.

Para pemimpin agama di Papua sekali lagi (akhir Des 2003) berupaya untuk mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk berefleksi diri dan kembali pada jalan yang benar dan damai, dengan mengajak agar segala tindakan kekerasan dihindari dan kebijakan Otsus dijadikan pegangan yang sejati. Mereka terus mengajak masyarakat di Papua termasuk para penguasa untuk bersatu dalam perjuangan menjadikan Papua Tanah Damai (5 Febr. 2004).

Sementara beberapa LSM bergumul dengan penyusunan baik Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, maupun pembentukan Komda Ham di Papua. Akhirnya suatu Tim Seleksi Anggota Komnas HAM Perwakilan Papua diangkat oleh Komnas HAM dan diakui serta direstui oleh pemerintah provinsi dan DPRD Papua.

Di Biak (akhir Feb 2004) wakil-wakil dari Dewan Adat Papua bergumul untuk mencari jalan supaya peranan adat diberikan tempat dalam kebijakan pemerintah dan diakui sebagai dasar kokoh dalam penyelesaian permasalahan di Papua. Salah satu pesan / amanat yang keluar dari pertemuan Dewan Adat supaya masyarakat di Papua menggunakan hak pilihnya dan juga supaya Otonomi Khusus diterapkan secara konsisten. Kedua pesan ini merupakan suatu pengarahan yang cukup berarti bagi masyarakat luas di Papua.

Tekanan kepada ‘organisasi sipil’ tetap terasa. Melalui penyebaran isu ‘campur tangan intel asing’ aparat keamanan turut menuding LSM atau malahan ‘tenaga lokal’ sebagai perpanjangan pihak asing/intel asing; di Jakarta organisasi seperti PBHI dan KontraS didemo oleh sekelompok yang mengancam kedua organisasi jika mereka terus mengkritik Indonesia, apalagi di forum internasional. Tidak jelas kelompok yang mengancam ini dikerahkan oleh siapa. Masih terkesan ruang bagi pengungkapan pendapat secara bebas makin hari makin dipersempit dan tidak jelas alasan yang sebenarnya. Pemakaian isu-isu yang kabur

(karena tidak disertai dengan bukti-bukti atau informasi yang transparan) kelihatan menjadi suatu cara yang laris di kalangan aparat keamanan.

PENEGAKAN HUKUM

Upaya serius untuk menjamin penegakan hukum di Papua dan di Indonesia pada umumnya masih tetap belum kelihatan, malahan sebaliknya. Kalau pada awal tahun lalu proses persidangan kasus Theys menjadi perhatian utama, pada akhir tahun perhatian utama diberikan pada penegakan hukum di Wamena.

Masyarakat di Wamena dikejutkan dengan dua tindakan hukum yang sama sekali tidak dapat dimengerti: [1] pemanggilan para terdakwa kasus Wamena Berdarah 2000 untuk masuk kembali ke penjara, dan [2] pemberian vonis di luar segala proporsi terhadap terdakwa kasus Wamena April 2003, penjara 15 tahun hingga tahanan seumur hidup (bdk. vonis terhadap terdakwa dari kalangan militer dalam kasus yang sama: 6 sampai 14 bulan penjara). Apalagi setelah diajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi (pertengahan Maret), Pengadilan Tinggi sudah mengeluarkan vonis pada tanggal 29 Maret 2004; waktu pemeriksaan berkas Memori Banding lazimnya 90 hari, namun dalam kasus ini ternyata para hakim hanya membutuhkan 7 hari untuk memperkuat vonis yang sudah ditetapkan oleh pengadilan negeri.

Pemanggilan kembali para terdakwa kasus Wamena Berdarah 2000 masih diperkeruh lagi dengan upaya secara diam-diam untuk memindahkan mereka dari penjara di Wamena ke Jakarta. Muncul pertanyaan, siapa mengatur semuanya ini, hingga kini tidak jelas, sehingga aspek penegakan hukum tidak terlihat dalam kasus ini.

Sedangkan persidangan kasus pelanggaran HAM berat Abepura yang proses peradilannya dipusatkan di Makassar, yang mesti sudah berjalan beberapa bulan lalu, lama tidak bisa berjalan karena terus 'diboykot' oleh pihak Polri yang tidak menyerahkan kedua terdakwa kepada pihak kejaksaan sebagai Penuntut Umum untuk ditahan dengan alasan, sedang menjalankan tugas negara. Akhirnya, menurut informasi terbaru, sidang akan dijalankan mulai tanggal 7 Mei 2004.

Ungkapan ketidakpuasan juga terbaca dalam penolakan pejabat baru Kakanwil Departemen Kehakiman di Jayapura oleh seluruh stafnya pada bulan Februari 2004.

Dalam keadaan yang serba gelap ini, syukurlah masih ada titik terang bagi penegakan hukum yakni langkah Komnas HAM yang telah memulai kegiatannya berupa KPP HAM untuk kasus Wasior maupun Wamena 2003 pada akhir bulan Februari 2004.

KEADAAN SOSIAL – EKONOMI dan KEPENDUDUKAN

Dalam dua tahun terakhir sangat terasa adanya perubahan di Papua. Perubahan ini terkait erat dengan Otsus Papua yang mulai diberlakukan sejak tahun 2002. Harapan bahwa melalui Otsus pemerintah Papua dapat melayani kebutuhan masyarakat secara lebih baik daripada

sebelumnya. Rupanya harapan masyarakat Papua juga menarik masyarakat lain di luar Papua untuk datang tinggal dan menikmati pelayanan yang ada. Ditambah juga adanya daya tarik dari pemekaran tingkat Kabupaten maupun Provinsi yang memang membuka peluang-peluang ekonomis baru. Maka, pemekaran rupanya menarik banyak warga dari luar Papua untuk memanfaatkannya. Sebagai akibat, penduduk di Papua bertambah dengan cepat. Di satu sisi, masyarakat mempunyai hak untuk mendapat pelayanan secara wajar dari pemerintah, tetapi disisi lain, pertambahan penduduk mendatangkan persoalan baru bagi pemerintah. Karena mau atau tidak, semua orang yang tinggal di Papua harus dilayani kebutuhannya, baik dibidang pendidikan, kesehatan, kesempatan bekerja, mendapat hak – hak sebagai perempuan, dll.

Pelayanan pemerintah selama dua tahun terakhir belum seluruhnya berjalan seperti yang diharapkan. Dalam beberapa Kabupaten malah muncul pertanda kemacetan seluruh pelayanan yang sangat dasariah seperti dibidang kesehatan dan pendidikan. Tanda-tanda demikian sudah dapat dibaca di Kabupaten Jayawijaya, dan juga di wilayah-wilayah yang baru dimekarkan karena belum tersedia suatu infrastruktur yang dapat menunjang suatu pelayanan minimal yang wajar. Kekurangan ini secara khusus terasa di bidang kesehatan; penyakit HIV/Aids masih menjadi momok yang menakutkan di Papua, angka kematian ibu dan anak masih cukup tinggi, di sejumlah pos pelayanan kesehatan atau pun rumah sakit tidak ada obat (Rumah sakit Wamena dipalang masyarakat karena tidak ada obat). Sama halnya dengan pelayanan pendidikan; dibanyak tempat masih terus mengalami kekurangan guru atau guru yang tugas di pedalaman pergi ke kota dan meninggalkan sekolah berbulan – bulan, dll.

Sedangkan pada bidang ekonomi, seperti di wilayah Sorong, Bintuni, Merauke, Bonggo-Sarmi dan Jayapura, pemerintah dan masyarakat Papua mengalami kerugian besar karena pencurian kayu (*illegal logging*) dan ikan (*illegal fishing*) secara besar – besaran. Rupanya pihak berwajib tidak mampu menjaga kekayaan-kekayaan ini; malahan sekali-kali diduga bahwa pihak keamanan sendiri terlibat kasus-kasus yang dimaksud, seperti kasus *illegal logging* di Sorong. Ketidakberesan ini terkait erat dengan penyakit korupsi dan mental rakus dalam masyarakat kita; segala sesuatu ditentukan oleh unsur “uang” (sogok) yang sudah menjadi kebiasaan bagi pejabat/anggota dewan demi kepentingan pribadi atau kelompoknya saja. Faktor-faktor demikian lebih rumit lagi dimana kegiatan ekonomis dikaitkan dengan kehadiran serta kepentingan aparat keamanan. Kita berhadapan dengan kebijakan-kebijakan yang lebih melayani kepentingan kelompok-kelompok, ketimbang kepentingan masyarakat umum.

Dalam kerangka suasana sosial-ekonomis mungkin perlu memberikan perhatian lebih khusus lagi pada susunan kependudukan di Papua. Muncul pertanyaan apakah para warga penduduk Papua sebenarnya *se-kepentingan* atau terbagi atas *kelompok-kelompok berkepentingan*?

Dalam kerangka proses pemekaran provinsi, telah kami tunjukkan pada pemecahbelahan masyarakat Papua, dan dalam hal itu lebih terfokus pada penduduk asli Papua. Yang masih kurang disoroti adalah sikap para warga yang bukan asli Papua. Mereka nampak kurang bersuara mengenai sejumlah kesulitan yang diuraikan diatas ini seakan-akan tidak tersentuh atau karena mereka merasa bahwa inilah persoalan orang Papua asli! Boleh jadi juga bahwa kepentingan para warga bukan asli Papua tidak dirugikan dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, maka mereka diam saja. Segala bentuk pemekaran pastilah membawaserta sejumlah peluang ekonomis, lebih-lebih dibidang pengadaan sarana fisik, maka peluang untuk memperoleh 'dana proyek' bertambah saja dengan kebijakan pemekaran ini. Bukan rahasia lagi bahwa kelompok yang paling menikmati keuntungan tersedianya proyek-proyek demikian adalah kelompok warga bukan asli Papua.

Memang benar banyak orang datang dari luar Papua karena tertarik pada peluang-peluang ekonomis yang ada di Papua (sebagai motivasi satu-satunya untuk bermigrasi); proses itu sudah berjalan selama puluhan tahun. Dilihat dari sudut susunan penduduk dewasa ini kita sudah menuju suatu 'keseimbangan jumlah' antara jumlah warga penduduk asli dan warga penduduk bukan asli. Hanya keseimbangan jumlah tidak sejajar dengan keseimbangan pada status kesejahteraan atau pada tingkat partisipasi dalam proses ekonomis atau politik di Papua. Kenyataan demikian sampai saat ini kurang diperhitungkan dalam segala macam gerak-gerik politik di Papua sejauh disuarakan oleh masyarakat Papua sendiri. Maka tidak mengherankan jika Pemerintah Pusat justru memperhitungkan perubahan kependudukan ini dalam menghadapi persoalan di Papua. Kelompok 'bukan-asli' yang mendekati 50 % dari seluruh penduduk di Papua merupakan suatu kenyataan, dan kelompok inipun memegang banyak posisi yang kuat secara ekonomis maupun politik. Sudah tentu suatu gambaran yang jelas mengenai kedudukan kelompok warga non asli Papua nanti akan ditunjukkan dalam hasil Pemilu 2004. Dapat diprediksi bahwa kelompok ini lebih cenderung memihak saja pada kebijakan pemerintah pusat daripada aspirasi politik dan ekonomis masyarakat asli Papua. Segala dampak dari kenyataan ini kurang direfleksikan, bahkan masih kurang mendapat tempat dalam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah maupun dalam rumusan aspirasi masyarakat asli Papua. Sehingga tidak perlu heran bila kenyataan ini dapat berkembang menjadi suatu sumber konflik yang subur di masa mendatang.

Walau kemajemukan penduduk di Papua bisa menjadi suatu sumber konflik, di sisi lain dapat menjadi suatu kekuatan. Kekuatan ini terletak dalam kepentingan bersama warga asli Papua dan bukan asli Papua kalau dilihat dari segi unsur-unsur kesejahteraan seperti tersedianya pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan umum lainnya. Kedua kelompok sama-sama berkepentingan agar pelayanan dimaksud berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dapat diperjuangkan secara bersama pula. Sama halnya menyangkut kebutuhan akan rasa aman; siapa yang menjadi warga di Papua dapat bergabung dalam tuntutan terhadap disiplin aparat keamanan, penegakan hukum, terhadap pengindahan HAM dsbnya. Kekuatan dimaksud sampai saat ini masih kurang disadari oleh keduabelah pihak, baik warga asli Papua maupun warga bukan asli Papua. Kehidupan bersama dan tanggung jawab atas mutu kehidupan di Papua membawa kewajiban bagi kedua kelompok untuk membuka diri satu

sama yang lain dan menyatukan kekuataannya demi menciptakan suatu “Tanah Damai dan Sejahtera” yang betul-betul bersahabat dengan setiap manusia. Kedua kelompok diharapkan saling merangkul dan saling memperkenalkan kebutuhan serta aspirasinya sehingga perwujudannya dapat dijadikan inti suatu perjuangan bersama.

SUASANA UMUM/NASIONAL

Sudah tentu bahwa sejumlah perkembangan di tingkat nasional turut mewarnai suasana yang berkembang di Papua. Salah satunya adalah semua kegiatan, keramaian menjelang pemilu. Seakan-akan tidak ada lain daripada Pemilu, sehingga kegiatan lain berupa program pembangunan, dsb ditunda. Sedangkan program-program yang sedikit sensitif seperti misalnya pembangunan fasilitas militer di Wamena dan Merauke dijalankan secara diam-diam saja, maka nyaris tidak mendapat perhatian. Proses menentukan Caleg dengan segala seluk-beluknya termasuk kegiatan kampanye menyita seluruh perhatian masyarakat. Dalam suasana ‘berpolitik’ ini kunjungan Megawati diterima dengan sikap sangat kritis, karena lebih melayani partainya daripada negara, sedangkan kedatangan para petinggi aparat keamanan (Kapolri dan TNI) hanya menambah kegelisahan dan ‘bahasa perang’ menjelang pemilu.

Dari segi hukum pernyataan ‘bebas murni dari korupsi’ oleh Mahkamah Agung dalam soal Akbar Tanjung tidak membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada ‘negara hukum’. Keputusan MA telah memicu banyak kritik di tingkat nasional dengan nada dasar: kepercayaan pada penegakan hukum turun sampai nol.

Dari segi lain kita semua merasa dihiburkan dengan keputusan untuk memberikan kebebasan bergerak (termasuk berpolitik) bagi para mantan anggota PKI. Hanya mengherankan bahwa sejumlah tokoh politik nasional sangat tidak setuju dengan ‘pembebasan’ ini.

Suatu laporan dari US State Department menyatakan bahwa selama ini belum ada perbaikan dalam suasana pengindahan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia; laporan ini menjadi alasan tanggapan keras pemerintah pusat atas ‘kelakuan Amerika’ sendiri, namun tidak dapat menghilangkan kesan bahwa pernyataan dalam laporan tadi benar dan berdasarkan fakta. Dalam kerangka perjuangan pengakuan Hak-Hak Asasi Manusia di Papua kita semua diteguhkan dengan suatu pernyataan pers oleh Uskup Desmond Tutu (Afrika Selatan) yang ditujukan kepada SekJen PBB untuk memberikan perhatian yang serius kepada suasana di Papua dan secara khusus pada sejarah bangsa Papua.